

# KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta)

Juli Panglima Saragih

P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik  
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270  
E-mail: saragihjulipanglima@yahoo.co.id.

Naskah diterima: 17 Maret 2014

Naskah direvisi: 27 Agustus 2014 dan 5 Januari 2015

Naskah diterbitkan: 29 Juni 2015

## Abstract

*Poverty rate in the Special Region of Yogyakarta (DIY) is relatively high at national scale. One of the factors contributing to such condition is inadequate budget from the central and regional government to support poverty eradication program. Such condition is the focus of this research. This is a qualitative research using descriptive-analysis method. This research uses relevant secondary data. The result of this research reveals that the central and regional governments of DIY should continuously improve the people's welfare in the region by formulating new strategies like creating job opportunity, business opportunity to low income people, and allocating more budget coming from regional and central governments. The regional government should also protect the poor by identifying and developing the potentials of local economy and productive efforts to boost the people's income. Coordination on the policy and program between the central and regional governments is particularly helpful in eradicating poverty in DIY.*

*Keywords: poverty, government policy, Special Region of Yogyakarta*

## Abstrak

Angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan. Selain itu kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY juga belum didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif-analisis. Sumber data menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.

Kata kunci: kemiskinan, kebijakan pemerintah, Daerah Istimewa Yogyakarta

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan (*poverty*) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak dan perlu dituntaskan serta dicari jalan keluarnya sampai saat ini. Menurut Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 31,02 juta orang. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin hingga September 2013 mencapai 28,55 juta orang, naik dari bulan Maret 2013 sebesar 28,07 juta orang. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berdampak langsung pada kenaikan ongkos transportasi dan harga barang (BPS, 2013).

Secara nasional, angka kemiskinan Indonesia pada tahun 1998-2013 terus menurun (lihat Tabel 1). Namun apabila dimasukkan jumlah penduduk yang nyaris miskin dan sedikit di atas garis kemiskinan, maka angka kemiskinan secara nasional justru bertambah. Sebab menurut BPS penduduk yang nyaris miskin dan sedikit di atas garis kemiskinan tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Berdasarkan analisis Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak satu dekade terakhir mampu mengurangi angka kemiskinan dari tahun 1999 sebesar 24,0 persen menjadi 11,3 persen pada tahun 2014. Tetapi dalam dua tahun terakhir, pengurangan angka kemiskinan sangat lambat yakni hanya 0,7 persen dan merupakan angka penurunan kemiskinan yang paling rendah selama sepuluh tahun terakhir (World Bank, 2014).

Program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah pusat sampai saat ini

**Tabel 1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2005-2013

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Sept. 2013
Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	35,1	39,3	37,17	34,96	32,53	31,02	30,02	29,13	28,55
Penduduk Miskin (persen)	15,97	17,75	16,58	15,42	14,15	13,33	12,49	11,96	11,70

Sumber: Buku Lampiran Pidato Presiden pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 16 Agustus 2012 dan Buku Statistik Indonesia Tahun 2013, BPS Jakarta.

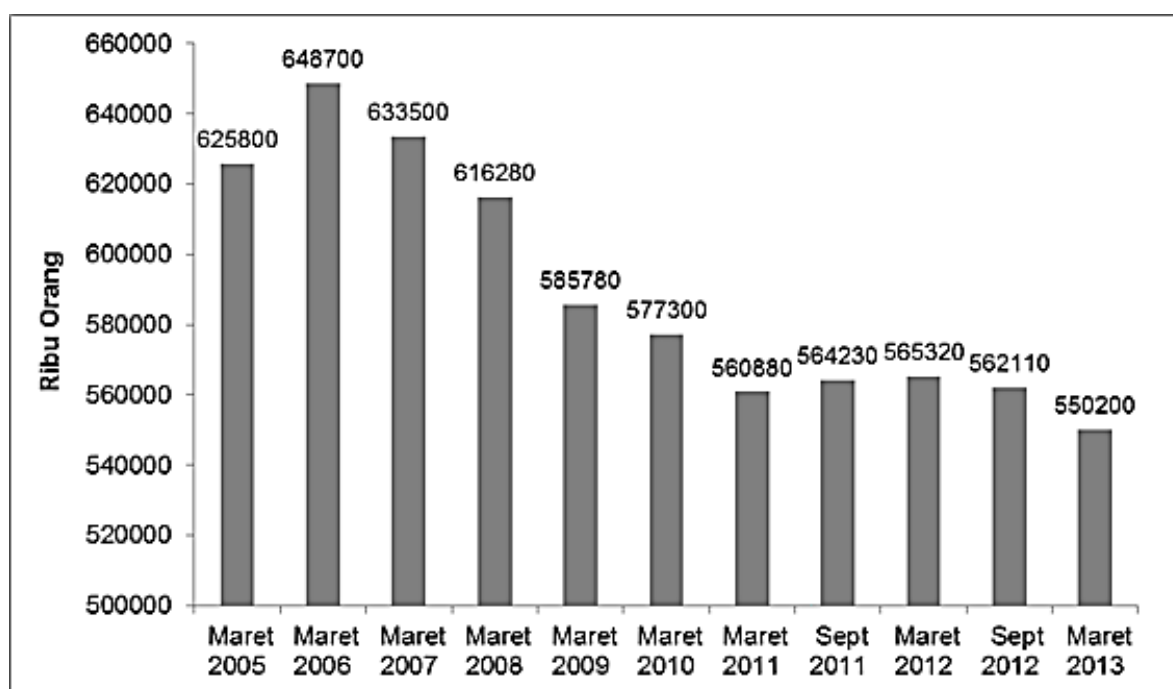
memang telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam pendidikan dasar, memenuhi kebutuhan dasar, seperti akses terhadap air bersih, listrik, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Namun kebijakan tersebut belum secara komprehensif mengentaskan kemiskinan dengan cepat dan menyeluruh terutama dari sisi ekonomi. Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan mutlak didukung dengan anggaran.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, target kemiskinan pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 8 sampai 10 persen dari total penduduk (TNP2K, 2010). Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki penduduk miskin cukup banyak adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY. Penduduk miskin di DIY tahun 2013 berjumlah 550.200 orang. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 585.800 orang

dan tahun 2010 berjumlah 577.300 orang atau turun sekitar 1,45 persen (Gambar 1) (BPS DIY, 2012).

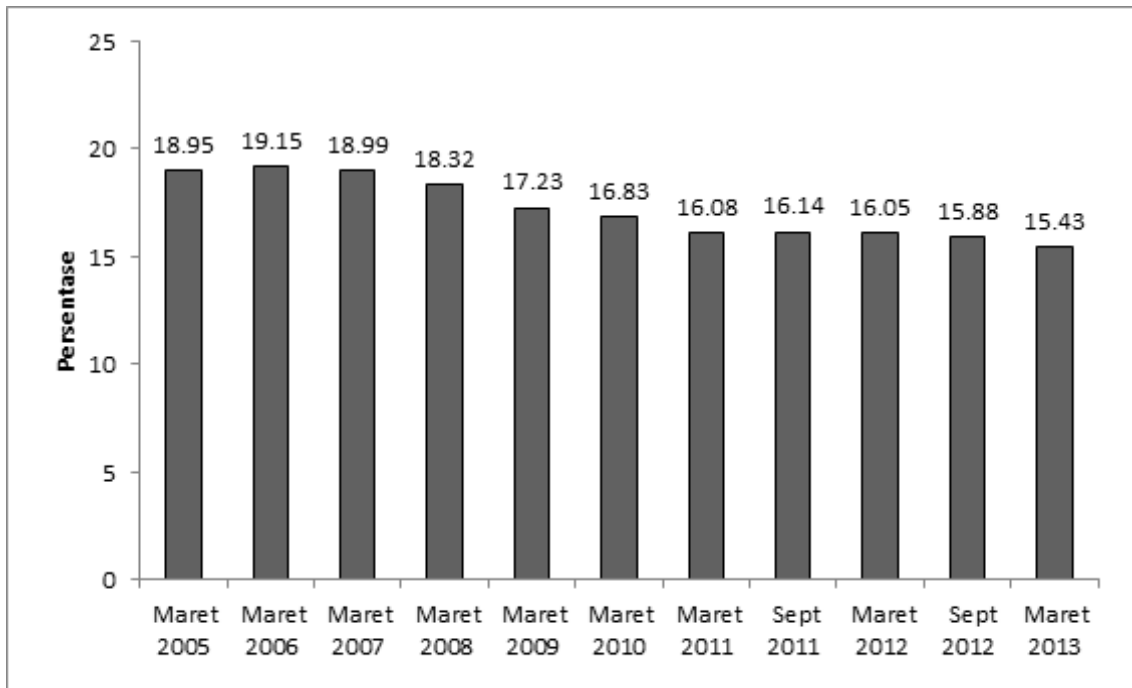
Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan rata-rata di DIY mencapai 16,83 persen dari total penduduk. Sampai bulan Maret 2013, angka kemiskinan penduduk DIY mencapai 15,43 persen dari total penduduk di DIY (Gambar 2). Sedangkan angka kemiskinan penduduk Indonesia mencapai 13,33 persen dari total penduduk nasional kurang lebih 237 juta jiwa. Dari seluruh kabupaten dan kota di DIY, Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2010 sebanyak 23,15 persen disusul Kabupaten Gunung Kidul 22,05 persen, Kabupaten Bantul 16,09 persen, Kabupaten Sleman 10,70 persen, dan Kota Yogyakarta 9,75 persen (BPS DIY, 2012).

Sampai September 2013, jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 535.180 orang atau 15,03 persen dari total penduduk DIY. Jumlah tersebut menurun sedikit dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 15,88 persen. Angka ini yang paling tinggi di seluruh provinsi di Pulau Jawa (Republika, 2013).



Sumber: DIY dalam Angka Tahun 2012, BPS DI Yogyakarta.

**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2013



Sumber: DIY dalam Angka Tahun 2012, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar 2.** Persentase Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2013

Angka kemiskinan di DIY masih tetap tinggi jika dibandingkan dengan target penurunan kemiskinan secara nasional 7-8 persen pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014. Namun diprediksi target angka kemiskinan di atas tidak tercapai pada akhir tahun 2014. Sedangkan target moderat yakni 8-10 persen (Kemenkopmk, 2014).

Penurunan angka kemiskinan di DIY tahun 2014 diprediksi hanya 0,08 persen dari angka 15,03 persen di tahun 2013. Salah satu penyebabnya adalah data kemiskinan penduduk antara pemerintah dengan BPS tidak sama dan harus disinkronkan terlebih dahulu. Di samping itu bantuan dana kepada penduduk miskin masih relatif kecil dan cenderung tidak tepat sasaran sehingga hanya dapat turun di bawah 1 persen.

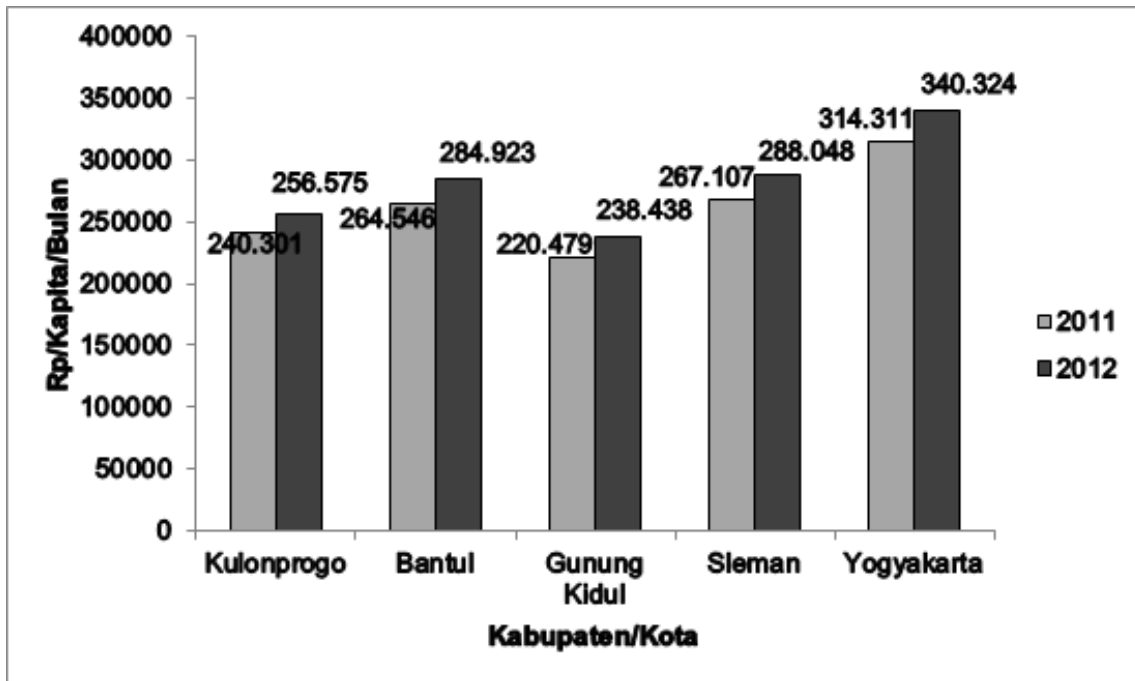
Di lihat dari sisi sektor penyumbang kemiskinan di DIY, maka sektor pangan menyumbang kemiskinan lebih besar dibandingkan sektor nonpangan seperti sektor perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan sektor pangan atau makanan/minuman terhadap garis kemiskinan pada September 2013 mencapai 72,22 persen tidak jauh berbeda dengan September 2012 sebesar 71,50 persen (Tribun News Jogja, 2014).

Di lihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita DIY, pada tahun 2010 pendapatan per kapita DIY sebesar Rp13.196.158,72 dalam setahun dengan nominal PDB atas dasar harga berlaku tanpa migas sebesar Rp45.625,6 miliar. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 berjumlah Rp14.850.000. Pada tahun 2012 meningkat menjadi

Rp16.350.000. Sedangkan PDB per kapita tahun 2013 mencapai Rp17.980.000. Peningkatan PDB per kapita DIY tahun 2013 tersebut adalah didukung dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,40 persen (BPS DIY, 2014).

Jumlah PDB DIY tahun 2010 hanya berkontribusi sebesar 0,94 persen terhadap total PDB Indonesia sebesar Rp4.850.080,8 miliar. Sedangkan garis kemiskinan di pedesaan di DIY per September 2013 berjumlah Rp275.786 per kapita per bulan dan di perkotaan berjumlah Rp317.925 per kapita per bulan (BPS, 2013).

Karakteristik penduduk miskin di DIY juga ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk. Sebagian besar penduduk dengan pendapatan per kapita rendah, dan keterbatasan lapangan kerja di sektor formal. Dampaknya adalah pilihan lapangan kerja yang dapat diakses warga menjadi terbatas dan cenderung bergeser ke sektor informal seperti pedagang kaki lima dan musiman. Tahun 2012 misalnya, 41,66 persen dari seluruh angkatan kerja miskin hanya mampu bekerja di sektor informal. Sektor informal yang dimaksud adalah sektor pertanian terutama buruh di sektor pertanian, sektor perdagangan eceran (skala kecil/mikro) atau sektor informal, dan sejenisnya. Data tahun 2012 menunjukkan 34,38 persen penduduk DIY hanya tamat sekolah dasar ke bawah, diikuti dengan lulusan SLTP sebesar 18,29 persen, lulusan SLTA sebesar 34,01 persen, dan pendidikan Diploma ke atas sebesar 13,32 persen (BPS DIY, 2012).



Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar 3.** Perkembangan Garis Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2012

Fenomena ini menjadi menarik untuk dicermati dan sekaligus memberikan bukti penting bahwa kemiskinan di Indonesia, termasuk di DIY pada dasarnya bersifat multidimensi. Oleh sebab itu perspektif dari sisi agregat ekonomi dalam melihat kemiskinan harus dilengkapi dengan indikator-indikator lainnya yang bersifat nonekonomi, termasuk upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas pribadi masyarakat (*human capital*) miskin itu sendiri sehingga menjadi lebih mandiri dan produktif. Di samping itu, Pemerintah DIY juga perlu mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab utama kemiskinan penduduk dan kemungkinan untuk meningkatkan anggaran dalam APBD setiap tahun.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah DIY sudah dilakukan selama ini. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan DIY antara lain yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (*Self Employment Program*), dan Proyek Pembangunan Fisik dalam program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (*Public Work Program*), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, dan lain sebagainya (Lampiran Pidato Presiden RI, 2014).

Selain itu, program penanggulangan kemiskinan di DIY yang melibatkan sosial-budaya lokal adalah program penanganan kemiskinan

terpadu yakni “*Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta*”. Program Segoro-Amarto merupakan program yang melibatkan partisipasi (*participatory approach*) dari semua pihak untuk menanggulangi kemiskinan dan tidak menjadikan masyarakat miskin sebagai objek tetapi sebagai subjek pembangunan. Harapannya bahwa masyarakat menengah ke bawah di DIY lebih berdaya dan diharapkan dapat menstimulasi masyarakat miskin dan yang kurang berdaya untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan (BPS DIY, 2012).

Dari gambar 3, dapat dilihat bahwa, pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Gunung Kidul merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten/kota di DIY. Walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita per bulan dari tahun 2011 ke tahun 2012 di kabupaten tersebut, tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa dengan pendapatan per kapita yang relatif kecil tersebut, praktis sebagian besar penduduk di Kabupaten Kulon Progo sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan yang cukup dan perumahan yang layak huni, apalagi kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier.

Dalam musyawarah rencana pembangunan daerah tahun 2012, misalnya program penanganan kemiskinan penduduk di DIY difokuskan pada 20 kecamatan di seluruh kabupaten/kota dengan 279 program. Kota Yogyakarta terdiri dari 74 program; Kabupaten Bantul 90 program; Kabupaten Kulon Progo berjumlah 90 program; Kabupaten Sleman dengan 84 program; dan Kabupaten Gunung Kidul

dengan 86 program. Strategi program pro perluasan kesempatan kerja terdiri dari 13 program, pro kemiskinan berjumlah 67 program, pro pertumbuhan ekonomi berjumlah 54 program, pro lingkungan hidup berjumlah 6 program, dan pro tata kelola pemerintahan berjumlah 72 program (BPS DIY, 2012).

## B. Permasalahan

Pengentasan kemiskinan di DIY sebagaimana di daerah lain di Indonesia memang terus dilakukan sampai saat ini baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DIY. Tetapi penurunan penduduk miskin DIY tidak terlalu signifikan dan relatif masih cukup banyak dibandingkan di daerah lain yang angka penduduk miskinnya relatif sedikit. Pemerintah DIY sudah berjuang terus menurunkan penduduk miskin di daerahnya dengan berbagai strategi, baik melalui kebijakan fiskal dalam APBD, maupun dengan melibatkan masyarakat miskin itu sendiri. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menjadikan penduduk miskin sebagai subjek bukan sebagai objek sehingga penduduk miskin dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan di DIY.

## C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif baik kebijakan nasional pemerintah pusat maupun kebijakan Pemerintah DIY.

## II. KERANGKA TEORI

### A. Kriteria dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan saat ini sudah menjadi masalah pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan dapat dengan mudah diketahui dan ditandai dengan kondisi keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, serta banyaknya jumlah pengangguran penduduk, yang selanjutnya menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antargolongan penduduk.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan dengan standar kehidupan yang sangat rendah. Kemiskinan dapat juga didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kehidupan dasar sebagai manusia khususnya makanan dan pakaian. Beberapa konsep kemiskinan yang umum dikenal yaitu kemiskinan absolut (*absolutely poor*) dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu (a) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan (b) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (Hendra, 2010).

*Kedua*, kemiskinan relatif yaitu tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas. Sebagai analogi adalah seseorang yang tinggal di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki pendapatan yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, tetapi pendapatannya masih jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya. Orang atau keluarga tersebut merasa dirinya masih miskin. Kemiskinan ini lebih banyak ditentukan lingkungannya. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau sekeluarga. *Kedua* istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antarpenduduk (Hendra, 2010).

Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subjektif merupakan konsep pengukuran kemiskinan yang dilakukan secara statis. Sedangkan kemiskinan subjektif diukur berdasarkan persepsi dari penduduk atau rumah tangga itu sendiri. Kelebihan dari pendekatan kemiskinan subjektif ini adalah bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan secara mudah sehingga hasilnya dapat disajikan lebih cepat, lebih sering, dan lebih teratur (Firdausy, 2012).

Menurut BPS, terdapat 14 kriteria keluarga miskin yaitu (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang, (2) jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, (3) jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rimbia/kayu berkualitas rendah/dinding tembok tidak diplester, (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, (6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, (7) kayu bakar/arang/minyak tanah sebagai bahan bakar memasak sehari-hari, (8) mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam 1 minggu, (9) hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun, (10) hanya sanggup makan satu kali/dua kali dalam 1 hari, (11) tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/poliklinik, (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan, (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga:

tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD, dan (14) tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual dengan nilai Rp500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya (BPS, 2006). Indikator kemiskinan di atas membutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya baik dari aspek ekonomi maupun nonekonomi.

Bank Dunia pada tahun 2008, menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara. Di negara sedang berkembang seseorang disebut miskin bila berpendapatan kurang dari USD1 per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut. Sementara garis kemiskinan Bank Dunia adalah diukur berdasarkan ukuran pendapatan sebesar USD2 per hari juga telah dipublikasikan di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Adapun USD yang digunakan adalah USD PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut (Purwanto, 2007).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan beberapa pendekatan utama dalam menetapkan garis kemiskinan (*poverty line*), antara lain pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Pendekatan pendapatan melihat kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah, lahan pertanian dan perkebunan, sehingga secara langsung memengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.

Variabel untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak atau tidak dikatakan miskin, maka sekaligus menentukan skoring tingkat keparahan kemiskinannya yaitu luas bangunan rumah yang dimiliki, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar (sanitasi), sumber air minum, sumber penerangan/listrik, jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam, dan susu seminggu, frekuensi makan sehari, jumlah setel pakaian baru yang dibeli setahun, akses ke puskesmas atau poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan kepemilikan beberapa aset baik bergerak maupun aset yang tidak bergerak.

Menurut BPS, terdapat dua pendekatan konsep kemiskinan yakni: *pertama*, pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu kemampuan

seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang dimaksud penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

*Kedua*, pendekatan *head count index*, yaitu merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Artinya, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan makanan-minuman dan nonmakanan minuman. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu (1) garis kemiskinan makanan (*food line*) dan (2) garis kemiskinan nonmakanan (*nonfood line*) (Kuncoro, 2004).

BPS mendefinisikan garis kemiskinan (*poverty line*) adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita penduduk setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Sedangkan konsep Garis Kemiskinan (GK) BPS merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan (BPS, 2009).

Dalam pengertian konvensional, kemiskinan hanya dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (*income*) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan konsep *United Nation Development Program* (UNDP), bahwa seseorang dikatakan miskin, jika tingkat pendapatannya hanya berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara berkembang, baik pemerintah maupun organisasi nonpemerintah kebanyakan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya,

berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal karena hanya pada pendekatan pendapatan (Prayitno, 2010b).

Todaro (1983) menjelaskan kemiskinan absolut adalah kondisi di mana masyarakat berada di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian (sandang), dan tempat tinggal (rumah). Kondisi masyarakat tersebut akan mengalami tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang rendah, dan tingkat produktivitas yang juga sangat rendah. Dampak dari pendidikan yang rendah mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengakses dan bersaing dalam bursa lapangan kerja di pasar kerja (Sukirno, 1985).

Dalam mengkaji permasalahan kemiskinan di Indonesia, sedikitnya terdapat 9 dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan yaitu (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan perumahan), (2) aksesibilitas yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi), (3) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital, (4) rentan terhadap faktor guncangan eksternal yang bersifat individual maupun massal, (5) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan, (6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, (7) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan, (8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun cacat mental, dan (9) ketidakmampuan secara sosial (World Bank, 2013).

## B. Teori Kemiskinan

Yang dimaksud dengan lingkaran perangkap kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling memengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu, tetapi juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan masa mendatang. Di negara-negara miskin tidak mungkin dilakukan pertumbuhan pembentukan modal (investasi) yang tinggi (Sukirno, 1985).

Teori perangkap kemiskinan lainnya juga dikemukakan oleh Meier dan Baldwin yang menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu masyarakat, harus ada tenaga kerja yang mempunyai

keahlian (*skill*) untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Di negara-negara berkembang, kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya diusahakan dan dikembangkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah sehingga menyebabkan kurangnya tenaga ahli yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terbatasnya mobilitas sumber-sumber daya yang ada di negara tersebut, termasuk keterbatasan modal (Sukirno, 1985).

## C. Studi Kemiskinan Terdahulu

Studi atau penelitian tentang masalah kemiskinan juga sudah dilakukan oleh lembaga riset dan lembaga lainnya. SMERU *Research Institute* misalnya, berdasarkan survei yang dilakukan pada 100 desa di Indonesia periode Agustus 1998-Oktober 1999 menyimpulkan bahwa, terdapat hubungan negatif yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Artinya pada saat perekonomian tumbuh, kemiskinan cenderung berkurang, tetapi ketika perekonomian mengalami kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan kembali meningkat atau bertambah. Menurut SMERU, pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan justru penting untuk mengurangi kemiskinan, di samping kebijakan nonekonomi lain, seperti manajemen kejutan (*shock policy*) dan jaring pengaman (*social safety net*) yang harus terus diterapkan (Kuncoro, 2004).

Menurut Mudrajad Kuncoro, untuk mengurangi atau memperkecil angka kemiskinan, maka masyarakat miskin perlu mendapatkan berbagai akses seperti: akses terhadap lapangan pekerjaan, faktor produksi, akses pasar dan akses kepemilikan aset, fasilitas pendidikan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan sebagai fasilitas layanan publik (Kuncoro, 2004).

Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY yang sedang dan akan dilakukan pemerintah antara lain adalah (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil, (4) menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antarkabupaten, (5) kebijakan penetapan sasaran dengan menggunakan metode dan daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sama, (6) kebijakan berkaitan program-program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan, (7) kebijakan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif, dan (8) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan agar

dapat diketahui dan ditindaklanjuti di masa datang. Strategi kebijakan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 klaster utama yaitu program bantuan dan perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan program pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil (Armunto, 2015).

Pemberian penilaian dan penyampaian saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat dan DIY masih perlu ditingkatkan di berbagai daerah termasuk di DIY. Kurangnya partisipasi masyarakat karena tidak tersedianya akses atau media untuk menyampaikan penilaian terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian evaluasi kebijakan merupakan upaya penyempurnaan program agar dapat berjalan sesuai rencana (Mulyadi, 2014).

### III. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan suatu permasalahan kemiskinan penduduk DIY dengan mendekatkannya berdasarkan kriteria dan ukuran kemiskinan serta teori kemiskinan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dari bahan-bahan literatur yang relevan dengan judul tulisan dan referensi lain.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah dilakukan sejak pemerintahan orde lama, orde baru sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, persoalan kemiskinan sudah bersifat multidimensi atau sangat kompleks, sehingga angka kemiskinan hanya dapat diturunkan secara optimal apabila semua pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Fokus kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam RPJMN periode tahun 2010-2014 sebagai kelanjutan dari RPJMN tahun 2004-2009, yaitu pemberdayaan masyarakat yang ditopang dengan mekanisme perlindungan sosial dan dikuatkan melalui pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Empat pilar utama kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu (1) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro *poor* dengan perluasan usaha-usaha yang melibatkan orang miskin dan penciptaan lapangan kerja, (2) memperluas kebijakan *affirmative* atau keberpihakan pada masyarakat miskin melalui pelaksanaan empat klaster, (3) meningkatkan kapasitas efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah, termasuk daerah terpencil

dan perbatasan, dan (4) menata dan meningkatkan kualitas pelaksanaan lembaga jaminan sosial seperti BPJS. Sedangkan 5 fokus prioritas kemiskinan yaitu (1) perlindungan sosial berbasis keluarga, (2) PNPM mandiri, usaha mikro dan usaha kecil, (3) program-program pro rakyat, (4) koordinasi kelembagaan, dan (5) harmonisasi penanggulangan kemiskinan (Lampiran Pidato Presiden RI, 2012).

Program kemiskinan pro rakyat saat ini yang sedang dilaksanakan di Indonesia adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Raskin, kebijakan subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi Kredit Ketahanan Pangan (KKP), dan subsidi listrik (energi) yang didukung oleh kebijakan fiskal dalam APBN (Kementerian Keuangan, 2013, 2014). Di samping program dan kebijakan yang fokus dan langsung kepada kelompok masyarakat miskin sebagai target sasaran, pengentasan kemiskinan juga dapat diatasi melalui pertumbuhan ekonomi.

Indonesia masih harus menghadapi tiga masalah mendasar dalam upaya menghapus kemiskinan (World Bank, 2013), yaitu *pertama*, mempercepat pertumbuhan ekonomi (PDB). Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata masih 6 persen per tahun pascakrisis tahun 2008. Bahkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diprediksi hanya 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 mencapai 5,4 persen (Tabel 2). Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, relatif sulit untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan pertumbuhan yang berkualitas serta terdistribusi ke seluruh daerah. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota di mana penduduk miskin berada.

Periode pascakrisis ekonomi tahun 1998 menunjukkan berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan oleh membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan (pangan). Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan, termasuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi DIY yang semakin tinggi, maka diharapkan kue pembangunan akan terdistribusi ke daerah kabupaten/kota di DIY.

*Kedua*, peningkatan pelayanan sosial (*social safety net*) bagi masyarakat miskin. Peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan sosial, dapat dicapai dengan mengusahakan

**Tabel 2.** Produk Domestik Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2013

(Rp triliun)

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>PDB (ADHK)</b>	18,29	19,21	20,06	21,04	22,13	23,31	24,57
<b>PDB (ADHB)</b>	32,92	38,10	41,41	45,63	51,79	57,03	63,69
<b>Pertumbuhan PDB (persen)</b>	4,31	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32	5,40

Keterangan: ADHK: atas dasar harga konstan, ADHB: atas dasar harga berlaku.

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS DI Yogyakarta, Nomor 11/02/34/Th.XVI, 5 Februari 2014.

perbaikan dalam sistem kelembagaan dan kerangka hukum, termasuk dalam aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini akan membuat penyedia jasa mengenali tanggung jawab mereka dalam menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, di samping memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi aktivitas tersebut.

*Ketiga*, perlindungan (*protective*) bagi si miskin. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu butuh perlindungan sosial dan bantuan ekonomi secara langsung. Hampir 40 persen penduduk hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari USD2 per hari. Perubahan sedikit saja dalam tingkat harga khususnya kenaikan harga BBM, pendapatan, dan kondisi kesehatan, dapat menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk sementara waktu.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI mengemukakan terdapat empat pilar strategi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia yaitu (1) *promoting and creating opportunity*, (2) *community empowerment*, (3) *capacity building and human resources development (HRD)*, dan (4) *social protection*. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang pernah dilakukan pemerintah antara lain adalah program Inpres Desa Tertinggal (IDT), PPSDT, PPK, PPKP, PDMDKE, PARUL, PSEM, PNPM Perkotaan dan Pedesaan, BLT/BLM, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP).

Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikelompokkan berdasarkan klaster yaitu klaster *pertama*, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan cakupan 500.000 KSM, 7 provinsi, termasuk DIY, 48 kabupaten/kota, 337 kecamatan, dan 4.311 desa/kelurahan di Indonesia. Program subsidi beras untuk

masyarakat miskin, BSM dan Bidik Misi, Jamkesmas, dan keluarga berencana. *Klaster kedua* yaitu program berbasis pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pengembangan usaha agribisnis pedesaan, PNPM Mandiri kelautan dan perikanan. Sedangkan klaster *ketiga* adalah program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui skema kebijakan kredit usaha rakyat (Lampiran Pidato Presiden RI, 2012).

## B. Pembahasan

Untuk menanggulangi kemiskinan di DIY, diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai sektor baik di pusat maupun kebijakan Pemerintah DIY. Sumodiningrat, (2006), menyatakan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung.

### 1. Kebijakan Langsung

Kebijakan langsung mencakup (1) pengembangan data dasar (*data base*) penduduk miskin dalam penentuan kelompok sasaran (*targeting*), (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan), (3) penciptaan kesempatan kerja, (4) Program Pembangunan Wilayah (PPW), (5) pengalokasian anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBD, dan (6) pelayanan perkreditan seperti KUR (Sumodiningrat, 2006).

### 2. Kebijakan Tidak Langsung

Kebijakan tidak langsung yang dilakukan Pemerintah DIY meliputi (1) upaya menciptakan ketenteraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial, dan politik, (2) mengendalikan jumlah penduduk, dan (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Kebijakan tidak langsung ini dapat mendukung dan bersinergi dengan kebijakan

langsung. Kebijakan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif di DIY.

Sumodiningrat (2006) menjelaskan bahwa perlu strategi kebijakan Pemerintah DIY yang memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan Sumber

Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal di DIY. Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat DIY, seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di DIY. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan

**Tabel 3.** Program Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan	Program	Sasaran
<b>Kelompok Program 1</b>	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin, dan Sangat Miskin
	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Sekolah Dasar (SD/MI)	Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)	Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)	Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
<b>Kelompok Program 2</b>	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri:	Kelompok Masyarakat Umum
	a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
	c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (bencana, konflik, dan lain-lain)
	d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
	g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
	h. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
	i. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	j. PNPM <i>Green Kecamatan Development Program</i> (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
k. PNPM <i>Neighbourhood Development</i> (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan	
<b>Kelompok Program 3</b>	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program KUBE dan UEP	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif

Sumber: Tim Koordinasi Penganggulan Kemiskinan Daerah DIY, 2013 dan Penjelasan Pejabat dari Dinas Sosial Provinsi DIY.

**Tabel 4.** Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (BSBK) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan	BLSM 2012 (Bantuan Tunai)	Raskin (Beras/ Pangan)	Jamkesmas (Asuransi kesehatan)	BSM (Pendidikan)	PKH (Bantuan Tunai Bersyarat)
Jenis Transfer	Tunai	Beras bersubsidi	Biaya pelayanan kesehatan gratis	Tunai	Tunai dan bersyarat
Sasaran	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Murid dan RT Miskin	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
Jumlah Penerima	18,5 juta RT	17,5 juta RT	18,2 juta RT	4.560.501	1,5 juta RTSM
Jumlah Bantuan	Rp150.000 per bulan	14 kg beras per bulan	Tidak terbatas	Rp561.759 per tahun	Rp1.287.000 per tahun
Lembaga Pelaksana Utama	Kemensos	Bulog dan Kemendagri	Kemenkes	Kemendiknas, Kemenag	Kemensos

Sumber: Tim Koordinasi Penganggulan Kemiskinan Daerah DIY, 2013 dan penjelasan dari Pejabat Dinas Sosial DIY.

peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan kemiskinan tersebut (Sumodiningrat, 2006).

Hasil riset Achmad Fatony menjelaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis *participatory poverty assessment* di DIY adalah efektif dilaksanakan, karena pendekatan ini disadari sebagai pendekatan yang memadai dalam pemberdayaan masyarakat DIY. Namun di tingkat implementasi, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masih kurang melibatkan penduduk miskin DIY sebagai subjek atas kegiatan untuk memecahkan masalah mereka sendiri (*self help*). Pada umumnya yang memperoleh manfaat dari program kebijakan pengentasan kemiskinan bukanlah orang-orang miskin, tetapi mereka yang memiliki akses informasi dan dekat dengan kekuasaan lokal (Fatony, 2014).

Program perlindungan sosial di DIY yang ada tidak mencukupi dalam menurunkan tingkat risiko bagi keluarga miskin, walaupun memberikan manfaat pada keluarga yang relatif sedikit lebih mampu. Karena pada dasarnya perlindungan sosial yang dilakukan bersifat jangka pendek untuk mempertahankan daya beli mereka dengan dana yang relatif kecil, seperti bantuan kepada fakir miskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kondisi ini dapat diperbaiki dengan menyediakan program perlindungan sosial yang lebih bermanfaat bagi penduduk miskin, serta kelompok masyarakat yang benar-benar sangat rentan terhadap kemiskinan. Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah membuat program penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia, termasuk di DIY (Tabel 3).

Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, telah mengeluarkan strategi penanggulangan kemiskinan penduduk di wilayahnya, antara lain (1) perlindungan sosial, (2) perluasan kesempatan, (3) peningkatan kapasitas sumber daya, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) kemitraan (*partnership*), (6) pengembangan SDM penduduk miskin, dan (7) peningkatan kualitas hidup keluarga miskin (Pemkot Yogyakarta, 2007).

Selain itu, Pemerintah DIY bersama-sama pemerintah pusat melakukan program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (BSBK) yang secara detail dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga. Program bantuan sosial berbasis keluarga antara lain 1) program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Anak dan Balita terlantar (AB), 2) program Anak Dengan Kecacatan (ADK), 3) program Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), 4) program Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti sosial. Program ini dapat berbentuk bantuan uang tunai, raskin, jamkesmas, bantuan pendidikan untuk siswa miskin, dan bantuan tunai bersyarat dalam program keluarga harapan (Tabel 4).

Sejak tahun anggaran 1999, Pemerintah DIY telah membuat Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP) di DIY melalui Program P2KP peduli yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk yaitu *pertama*, Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL); *kedua*, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK); dan *ketiga*, Unit Pengelolaan Sosial (UPS). Salah satu keunggulan PPKP adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai agen utama (*community based program*). Dalam program P2KP, peran birokrasi dan fasilitator perlu diminimalisir. Sebaliknya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) DIY yang merupakan representasi

dari kelembagaan masyarakat di tingkat lokal justru diberdayakan sebaik mungkin (TKPKD, 2013).

Program PPKP yang paling menonjol adalah dana bergulir bagi kelompok usaha miskin atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sistem yang dibangun dalam dana bergulir (*revolving fund*) ini adalah tanggung-renteng. Dengan demikian setiap individu dalam kelompok punya tanggung jawab mengembalikan dana pinjaman itu yang selanjutnya akan digulirkan untuk kelompok usaha miskin lainnya. Modal awal dana bergulir ini dianggarkan Pemerintah DIY dalam APBD dengan bervariasi sesuai dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi kabupaten/kota di DIY. Di Kabupaten Bantul, dana awal mulai dari Rp100 juta sampai Rp500 juta (Prayitno, 2010a).

Di samping itu, data dari Kemenkokesra (2014) menunjukkan bahwa realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di DIY tahun anggaran 2013 dengan total dana PNPM/BLM berjumlah Rp126,600 miliar. Di samping itu dalam APBN Tahun Anggaran 2013 juga dialokasikan sebanyak Rp120,270 miliar, dan dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2013 dialokasikan sebanyak Rp6,330 miliar, yang dirinci per kabupaten/kota (Tabel 5).

Berdasarkan keterangan Asisten Pemberdayaan Masyarakat DIY, DIY sebagai daerah tujuan wisata bukan jadi jaminan bahwa masyarakatnya lebih makmur dibanding dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia. Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi permasalahan pelik untuk dipecahkan di DIY. Penyebab kemiskinan dan pengangguran antara lain adalah kekurangan kebutuhan dasar, tidak mempunyai usaha produktif, tidak mempunyai keterampilan, daerah yang kurang

produktif, ketidakmampuan daerah tertinggal, serta tidak mempunyai modal (Anonim, 2013). Artinya, masyarakat miskin tidak secara langsung dapat merasakan kesejahteraan walaupun DIY ditetapkan menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang setiap tahun dikunjungi oleh wisatawan terutama wisatawan domestik. Kemajuan di sektor pariwisata dalam realitanya lebih berpihak pada pelaku ekonomi atau pelaku industri di sektor pariwisata, hotel, dan restoran.

Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pemerintah pusat sejak tahun 2007 di seluruh Indonesia termasuk di DIY, periode tahun 2007-2011. Volume KUR yang sudah disalurkan ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan menengah ke bawah di DIY untuk membantu masyarakat miskin sebesar 1,86 persen dari total KUR dengan jumlah debitur sebanyak 2,43 persen (Lampiran Pidato Presiden RI, 2011).

Pelaksanaan program KUBE dan UEP di DIY juga menemui beberapa kendala. Sebagai contoh, program KUBE yang merupakan program kelompok ini tidak dapat memenuhi persyaratan tanggung renteng. Jenis usaha yang berbeda-beda setiap anggota KUBE menjadikan keterikatan antaranggota dalam kelompok ini kurang kuat. Justru dari keterangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang merupakan pendamping program dari Dinas Sosial DIY, kelompok ini tidak sedikit yang terbentuk secara mendadak. Waktu persiapan yang cukup singkat juga menjadi keluhan para pendamping sosial dalam mempersiapkan program-program yang ada di lapangan (Fatony, 2014).

Kemiskinan di daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah yang termiskin di DIY, mendapatkan perhatian pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai skema program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Program Pemda Kabupaten Gunungkidul, skema yang masuk desa antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), program mandiri pangan, program kredit usaha mikro, hingga program infrastruktur fisik. Sedangkan dari Pemerintah DIY, terdapat program bantuan peternakan, subsidi pembangunan infrastruktur desa, program pendidikan, dan kesehatan. Dari pemerintah pusat, desa juga mendapatkan kucuran program PNPM, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jaminan kesehatan hingga pemberian kredit usaha mikro dan kredit usaha kecil (KUR).

Banyaknya program yang dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul ternyata masih belum memperbaiki kualitas hidup masyarakat Gunungkidul secara berarti. Angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 25,96 persen dari total jumlah penduduk. Angka kemiskinan ini tak bergerak

**Tabel 5.** Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

No.	Kabupaten/ Kota	PNPM/BLM	APBN	APBD
1.	Kab. Bantul	24.475,00	23.251,25	1.223,75
2.	Kab. Gunung Kidul	48.500,00	46.075,00	2.425,00
3.	Kab. Kulon Progo	30.275,00	28.761,25	1.513,75
4.	Kab. Sleman	17.875,00	16.981,25	893,75
5.	Kota Yogyakarta	5.475,00	5.201,25	273,75
	Total Provinsi DIY (78 Kecamatan)	126.600,00	120.270,00	6.330,00

Sumber: Daftar Lokasi PNPM Mandiri Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013, Menkokesra.

jauh dari sebelumnya. Akar sebabnya, program penanggulangan kemiskinan masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pedesaan, di mana pembangunan infrastruktur menyedot porsi terbesar. Pembangunan jalan misalnya, ditujukan untuk memperlancar transportasi, yang selanjutnya akan meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan memberdayakan ekonomi desa secara umum (IRE, 2014).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa-desa di seluruh kabupaten/kota di DIY diharapkan dapat berkembang dari sisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan penjelasan Bappeda DIY (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013), Pemerintah DIY pada tahun anggaran 2013 menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp46 miliar untuk 46.000 kepala keluarga (KK) miskin produktif yakni Kota Yogyakarta Rp1,9 miliar; Kabupaten Bantul Rp13 miliar; Kabupaten Kulon Progo Rp6,7 miliar; Kabupaten Gunungkidul Rp16,6 miliar dan Kabupaten Sleman Rp8,1 miliar. Sementara hasil kajian BPS di lapangan bahwa untuk menekan angka kemiskinan di DIY hingga 2 persen pada tahun 2013, merekomendasikan harus memberi insentif atau bantuan sosial kepada 46.000 warga miskin. Sedangkan jika ingin menurunkan 3 persen angka kemiskinan maka dibutuhkan intervensi anggaran dari APBD sampai 60.000 warga miskin tergantung pada kemampuan APBD DIY. Kepala Bappeda DIY menjelaskan sesuai kemampuan APBD, DIY masih mampu memberikan bantuan sosial kepada 46.000 orang dan sudah mendapat persetujuan DPRD DIY sehingga setiap kepala keluarga miskin akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta per kepala keluarga (KK). Bantuan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi namun digunakan untuk kegiatan produktif lain serta berdasarkan pertimbangan garis kemiskinan di DIY yang pendapatannya berkisar Rp280 ribu per bulan (SAPA Indonesia, 2014). Pemerintah DIY juga telah mengeluarkan kebijakan pengadaan beras untuk rakyat miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2013 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota di DIY Tahun Anggaran 2013. Sebanyak 288.391 Rumah Tangga Sasaran mendapatkan bantuan beras miskin (Raskin) yang didistribusikan oleh Perum BULOG Divre DIY (Kedaulatan Rakyat, 2014).

Sedangkan Pemda Kabupaten Kulon Progo, misalnya, telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo DIY. Tim mengklaim program pengentasan kemiskinan mulai dari bedah rumah hingga ekonomi

kreatif mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah itu. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan mengalami penurunan 0,3 persen tahun 2014. Namun berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo, angka kemiskinan selama dua tahun terakhir 2012-2013 mengalami penurunan 2,1 persen dari 23 persen. Langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengentaskan kemiskinan antara lain dengan program kebijakan lokalnya telah mendapat pengakuan pemerintah pusat. Kebijakan pengentasan kemiskinan lokal diapresiasi dan menargetkan pengentasan kemiskinan 1,5 persen setiap tahun sejak 2011. Dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 angka kemiskinan diharapkan turun 7,5 persen setiap tahun. Pemda Kulon Progo menyadari mengurangi angka kemiskinan bukan hal yang mudah.

Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo juga memiliki program lokal pengentasan kemiskinan dengan Program Bantuan Dana Rp1 juta per kepala keluarga (KK) untuk kegiatan ekonomi produktif, Program Bedah Rumah, Program Orang tua asuh, Program Padat Karya, dan Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Anggaran Program Padat Karya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2012 dianggarkan Rp6 miliar dan pada 2014 mencapai Rp14 miliar. Program Padat Karya dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur di setiap desa yang menyerap tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Program Orang Tua Asuh (POTA) yang berbasis "*corporation*" juga terus berjalan (Antara News Jogja, 2015).

Upaya pemerintah pusat dan Pemerintah DIY dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan berbagai program yang sudah dan sedang dilaksanakan, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan penduduk di DIY ke depan. Diakui penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk di DIY tidak dapat dilakukan dalam waktu satu atau dua tahun, tetapi butuh waktu relatif lama. Strategi yang dapat dilakukan misalnya dengan senantiasa tetap melibatkan masyarakat miskin itu sendiri dalam program dan proyek pembangunan, sehingga benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, selain program yang bersifat *top-down* dari pemerintah.

Pengalokasian anggaran kemiskinan baik dalam APBN dan APBD sangat membantu terutama dalam hal akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Sebab sebagaimana ditegaskan dalam UUD Tahun 1945

bahwa tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Di samping itu, fakir miskin dan anak telantar juga merupakan tanggung jawab negara untuk dipelihara dan diberi perlindungan dan penghidupan yang layak. Pemerintah termasuk Pemerintah DIY perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan yang terdistribusi ke seluruh daerah.

Dengan semakin stabilnya perekonomian, maka pemerintah harus terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan, sehingga secara langsung berdampak positif kepada penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal guna mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat miskin semakin meningkat, termasuk masyarakat miskin di DIY.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY harus dilakukan secara terus-menerus dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada guna mencari solusi strategis di masa datang dan jangka panjang. Kebijakan fiskal daerah dengan peningkatan anggaran daerah baik APBD DIY maupun APBD kabupaten/kota di DIY, serta dana kemiskinan yang bersumber dari APBN dapat membantu masyarakat miskin yang didesain dengan program yang bersifat produktif dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan.

Kebijakan pengembangan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan sangat rendah perlu dikembangkan oleh Pemerintah DIY. Hal ini akan sangat membantu penduduk miskin untuk mandiri, dan meningkatkan penghasilan mereka yang pada gilirannya akan membantu untuk dapat bertahan hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Selain itu Pemerintah DIY juga perlu mendorong perekonomian daerah dengan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan investasi di sektor-sektor ekonomi guna menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian angka pengangguran juga akan berkurang.

Kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan di DIY seperti beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, juga dipandang membantu kelompok miskin, walaupun hanya bersifat jangka pendek. Namun pemerintah harus terus mencari kebijakan komprehensif dan strategis, serta jangka panjang yang mampu mengurangi angka kemiskinan secara nyata di DIY.

### B. Saran

Dalam upaya pengetasan kemiskinan di DIY, Pemerintah DIY perlu menempuh kebijakan antara lain *pertama*, mempertajam dan membuat prioritas-prioritas program kemiskinan yang nyata, setelah memetakan permasalahan kemiskinan penduduk. *Kedua*, menambah dan memfokuskan anggaran dalam APBD yang bersifat produktif untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil masyarakat DIY sebagai upaya meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan. *Ketiga*, mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah yang sangat potensial agar dapat memberikan *multiplier effect* bagi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, termasuk penduduk miskin dan berpenghasilan sangat rendah. *Keempat*, pemerintah kabupaten/kota di DIY perlu terus meningkatkan koordinasi dalam kebijakan dan implementasi setiap program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin, sehingga tidak terkesan tumpang tindih dan berjalan sendiri-sendiri. *Kelima*, pendekatan *participatory* dalam mengurangi angka kemiskinan penduduk di DIY, dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Indonesia tahun 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik Indonesia tahun 2013*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik DIY. (2012). *Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dan Susenas 1994-2012*. DIY: BPS.
- Firdausy, Carunia M. (2012). *Konsep dan ukuran kemiskinan alternatif*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hendra, Roy. (2010). *Determinan kemiskinan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi-UI.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.

- Mulyadi, Mohammad. (2014). *Kemiskinan: identifikasi penyebab dan penanggulangannya*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Publica Pers.
- Prayitno, Ujianto S. (2010a). *Kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui pengembangan sektor informal: kasus Yogyakarta*. Dalam Buku *Pembangunan Sosial*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
- Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Mewujudkan kesejahteraan bangsa: menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2012). *Buku panduan penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Sekretariat TNP2K.
- Todaro, Michael P. (1983). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Jurnal**
- Purwanto, Erwan A. (2007). Mengkaji potensi UKM untuk pembuatan kebijakan anti-kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (3), 300-301.
- Laporan**
- Prayitno, Ujianto S. (2010b). Kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin: studi pembangunan masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Batam. *Laporan Penelitian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.
- Sumber Digital**
- Anonim. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH) untuk DIY diluncurkan. Diperoleh tanggal 24 Januari 2013, dari <http://indonesia.go.id>.
- BPS. (2014). Meta data Subdit statistik kerawanan sosial. Diperoleh tanggal 13 Januari 2014, dari <http://www.bps.go.id/menutab>.
- Institute for Research and Empowerment (IRE). (2014). Penanggulangan kemiskinan di desa. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org).
- Kedaulatan Rakyat. (2014). Jumlah penduduk miskin DIY turun tipis. Diperoleh tanggal 15 Januari 2014, dari [www.krjogya.com](http://www.krjogya.com).
- Kemenkopmk. (2014). Target dan capaian persentase penduduk miskin. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari [http://datakesra.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/kemiskinan\\_file/%20MISKIN.pdf](http://datakesra.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/kemiskinan_file/%20MISKIN.pdf).
- Menkokesra. (2014). Daftar lokasi PNPM Mandiri Provinsi DIY tahun 2013. Diperoleh tanggal 11 Maret 2014, dari <http://datakesra.menkokesra.go.id/>.
- Republika. (2013). Tingkat kemiskinan di DIY tertinggi se-Jawa". Diperoleh tanggal 2 Oktober 2013, dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/01/02/mfzoyv-tingkat-kemiskinan-di-diy-tertinggi-sejawa>.
- SAPA Indonesia. (2014). Angka kemiskinan di DIY masih tinggi. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari [www.sapa.or.id](http://www.sapa.or.id).
- Tribun News Jogja. (2015). Program Pengentasan Kemiskinan di Gunungkidul Gagal. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari (<http://jogja.tribunnews.com/2014/03/26/program-pengentasan-kemiskinan-di-gunungkidul-gagal>).
- World Bank. (2013). Mengurangi kemiskinan. Diperoleh tanggal 11 November 2013, dari <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/reducingpoverty.pdf>.
- World Bank. (2014). New poverty frontier in Indonesia: reduction slows, inequality rises. Diperoleh tanggal 27 November 2014, dari [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).
- Dokumen**
- Kementerian Sekretariat Negara RI. *Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2011*.
- Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2012*.
- Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2013*.